

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, Leo. 2022. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal 154-158.
- Ardianto, Elvinaro. 2011. Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung : Simbiosis Rekatama Media. Hal. 180
- Bayu Surya Ningrat. 1992. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta. hal. 11.
- Edwards III, George C 1980. *Implementing Public Policy* Washington DC: *Congresional Quarterly Press*.
- Friedrich, Carl J. 1963. Man and His Government. Newyork : McGraw-Hill. Hal. 79.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gaya Media. Hal. 143.
- Inu Kencana Syafie. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta. hal. 8.
- Miriam Budiarjo, 2003, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 21.
- Mitchell, B., Setiawan, B., dan Rahmi, D.H., 2000, Resolusi Damai Konflik Kontemporer, PT Raja Gafindo Persada, Jakarta, hlm 16.
- Muhadam Labolo, 2007, Memahami Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Kelapa Gading Permai, hal. 24.
- Mulyadi, D. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal. 12.
- Mulyadi, Deddy, 2015, Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta. Hal. 12.
- Nugroho, Rian. 2003. Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi. Jakarta: Media Komputindo. Hal. 158.
- Nurmi Chatim, 2006, Hukum Tata Negara, (Pekanbaru:Cendikia Insani), hal. 48.
- Owens, R. G., 1991, *Organization Behavior in Education*. Boston: Allyn and Bacon.
- Ripley, Ronald Band Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: Dorsey Press.

- Robbins, S. P., 1990, *Organization Theory: Structure, Design and Applications*. EnglewoodCliffs: Prentice-Hall,Inc. Hal. 59.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Rajawali. hlm.123.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 9.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet. Hal. 95.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA). Hal. 368.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Hal. 03.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama. Hal. 80.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung:Refika. Hal. 135.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : APII Bandung. Hal. 39-40.
- Talizidhuhu Ndraha, 2003, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 6.
- Taufiq, M., & Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2). Hal. 136.
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process: A Concentual Framework in: Administration and Society* v 6 No. 4 p. 445-485.clvi.
- Wahyudi, 2017, *Manajemen Konflik dan Stres Dalam Organisasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 27.
- Widodo, 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative. Hal. 102-104.
- Zaini, Hafis. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh. Hal. 69.
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University. Hal 132
- Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal.168
- Bagi Manan, pengertian pemerintah dan pemerintahan, jakarta (2001: 101)

- Yusri Munaf, 2016, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, Pekanbaru, UIR Press. Hal. 48
- Rakhmat, Jalaludin. 1999, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. Hal.51
- Soenarjo dan Djoenarsih S. Soenajo. 1983. Himpunan Istilah Komunikasi. Yogyakarta: Liberty. Hal.25
- Ahmad, Subandi (1982) Psikologi Sosial, cetakan. Ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang halaman 50).
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: RinekaCipta. Hal.115-118
- Soerjono Soekanto (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja GrafindoPersada. Hal.22
- Kodoatie, Robert J. 2005. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.Yogyakarta: Andi Offset.

B. Dokumen

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomer 18 Tahun 2012 tentang Energi dan Ketenagalistrikan Pasal 10 Ayat (6).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

C. Jurnal / Disertasi

Adibowo, Rino (2015) Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi Di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). JIPSI - Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM, Vol.04. ISSN 2086 – 1109

- Azhar, M., & Satriawan, D. A. (2018). Implementasi kebijakan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(4), 398-412.
- Karniawati, N., dan Indriyani, Y. D. (2013). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PerDa) Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Cimahi). *Majalah Ilmiah UNIKOM*. Vol. 11 No. 1
- Kurniasih, Dewi. (2022). Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 28, No. 1
- Saifudin, M. F., Susilaningsih, A. W., & Wedi, A. (2020). Pengembangan Multimedia Interaktif Materi Sumber Energi untuk Memudahkan Belajar Siswa SD. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 68-77.
- Sukaesih, Poni. (2016). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kota Bandung. *JIPSi - Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 6 No. 2 DOI 10.34010/JIPSI.V6I2.326

D. Rujukan Elektronik

- Berita 2.900 PJU di Kota Bandung tak menyala. Melalui <https://news.republika.co.id/berita> (diakses pada tanggal 24 Agustus 2023)
- Laporan PJU tidak berfungsi dimalam hari di halaman facebook Halo Bandung. Melalui <https://www.facebook.com/halokotabdg/posts/kepala-bidang-penerangan-jalan-umum-pju-dinas-pekerjaan-umum-kota-bandung-herdis/2490869624465039/> (diakses pada tanggal 24 Agustus 2023)
- Sreenchotan pengaduan masyarakat melalui direct message instagram. Melalui <instagram@bidsarprastranshubkotabdg> (diakses pada tanggal 24 Agustus 2023)
- Layanan pengaduan lampu penerang jalan utama dari website Dinas Perhubungan Kota Bandung. Melalui <https://dishub.bandung.go.id/p/aplikasi-dishub-kota-bandung> (diakses pada tanggal 24 Agustus 2023)
- Format pengaduan keluhan lampu penerang jalan utama melalui chat WhatsApp. Melalui whatsapp.com (diakses pada tanggal 24 Agustus 2023)
- Berita lampu PJU di Kota Bandung banyak dicuri. Melalui <https://mediaindonesia.com/nusantara/521040/lampu-pju-di-kota-bandung-banyak-dicuri> (diakses pada tanggal 24 Agustus 2023)

- Pemok Bandung anggarkan Rp62 Miliar untuk PJU dan PJJ. Melalui [https://www.bandung.go.id/news/read/7503/pemkot-bandung-anggarkan-rp63-miliar-untuk-pju-dan-pjl#:~:text=Pemerintah%20Kota%20\(Pemkot\)%20Bandung%20menganggarkan,PJJ\)%20pada%20tahun%202023%20ini.&text=Jumlah%20tersebut%20untuk%20sebanyak%2047,yang%20ada%20di%20Kota%20Bandung](https://www.bandung.go.id/news/read/7503/pemkot-bandung-anggarkan-rp63-miliar-untuk-pju-dan-pjl#:~:text=Pemerintah%20Kota%20(Pemkot)%20Bandung%20menganggarkan,PJJ)%20pada%20tahun%202023%20ini.&text=Jumlah%20tersebut%20untuk%20sebanyak%2047,yang%20ada%20di%20Kota%20Bandung). (diakses pada tanggal 24 Agustus 2023)
- Peta kota Bandung melalui PPDB Kota Bandung 2021. Melalui <https://ppdb.bandung.go.id/> (diakses pada tanggal 24 Agustus 2023)
- Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 101 Tahun 2022. Melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/228792/perwali-kota-bandung-no-101-tahun-2022> (diakses pada tanggal 24 Agustus 2023)
- Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Melalui <https://dpu.bandung.go.id/> (diakses pada tanggal 24 Agustus 2023)
- Facebook Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung terkait pengalihan wewenang Lampu Penerang Jalan Utama di Kota Bandung. Melalui https://www.facebook.com/dpukotabandung/?paipv=0&eav=AfY80hNQE_DzKzS5W26lqldue7FfSL046hDU8h_Csxk-xyDLCdRblyqrLtDwMvC6Tgg&_rdr (diakses pada tanggal 24 Agustus 2023)